



Judul : Ulang Tahun Ke-73 : Duh, Paripurna DPR Cuma Diikuti 28 Persen Anggota
Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ulang Tahun Ke-73

Duh, Paripurna DPR Cuma Diikuti 28 Persen Anggota

Di Hari Ulang Tahun ke-73, kemarin, DPR menggelar Rapat Paripurna khusus. Meski itu hari istimewa, sebagian anggota Dewan tetap malas. Yang hadir di rapat itu cuma 161 orang alias 28 persen dari 560 anggota DPR.

BANYAKNYA Dewan yang bolos di rapat ini karena sebagian besar sedang mendekati masyarakat agar di Pemilu 2019 terpilih kembali. Mereka memilih berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk melakukan konsolidasi ketimbang ikut rapat di Jakarta.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Hutabarat mengakui hal ini. Kata dia, menjelang Pemilu, konsentrasi anggota Dewan memang sudah tidak fokus pada kerja di DPR lagi. Jumlah kehadiran mereka dalam rapat-rapat pun terus berkurang.

"Sejauh ini, frekuensi ke-

hadiran anggota-anggota di rapat Komisi, Baleg, maupun Paripurna sudah mulai berkurang. Ini karena masing-masing anggota yang menjadi caleg lagi sudah semakin sibuk membina dapil masing-masing. Membina konstituen masing-masing," kata politisi senior Gerindra ini, kemarin.

Kata Martin, Pemilu 2019 akan menguras tenaga para Anggota DPR. Beban mereka semakin berat. Bukan cuma bertarung dengan sesama kader internal partai sendiri, tetapi juga dengan caleg partai lain. Sebab, parliamentary threshold alias ambang batas partai lolos ke

DPR juga makin besar, yakni 4 persen dari suara nasional.

"Pasti akan semakin kurang daya kerjanya, walaupun sebenarnya tidak boleh anggota Dewan mengabaikan atau menomorduakan tugas-tugasnya di DPR. Tidak boleh mengabaikan dia. Tapi, realitas menunjukkan lain, karena semangat menang ini sangat tinggi di kalangan DPR. Apalagi ada merasa ketakutan dikalahkan calon-calon baru," ucapnya.

Dia berharap, hal ini disikapi Pimpinan DPR. Pimpinan DPR harus membuat terobosan. Salah satunya dengan memadatkan agenda rapat. Dengan begitu, para anggota Dewan punya waktu lebih untuk berkunjung ke daerah dan membina dapil masing-masing.

"Kalau perlu, agenda persidangan dibuat padat dari pagi sampai malam. Sehingga, untuk para anggota DPR yang nyaleg

lagi, pada Jumat, Sabtu, dan Minggu bisa konsen ke dapil masing-masing. Itu satu-satunya cara. Daripada lebih banyak lagi anggota DPR yang tidak hadir, lebih baik dipadatkan. Kalau perlu sampai malam," sarannya.

Apa perlu ada sanksi moral bagi anggota DPR yang malas sidang? Martin menganggap hal itu tidak akan efektif. Sebab, sanksi itu tidak menjadi parameter masyarakat dalam memilih anggota Dewan. Masyarakat lebih cenderung memilih calon banyak membawa logistik kepada mereka.

"Pertimbangan rajin atau tidak bukan parameter rakyat memilih atau tidak. Berprestasi atau tidak, saya lihat bukan itu pertimbangan rakyat. Tapi, apa yang dibawa. Jadi, tergantung besarnya yang dibawa ke dapil. Itu saja pertimbangan yang dipilih. Memang sudah begitu

faktanya," jelasnya.

Untuk para koleganya di DPR, dia mengajak tetap melaksanakan tugas utama sebagai Dewan dengan baik. Sebab, DPR sudah menetapkan target legislasi pada masa sidang ini. Kalau target itu tidak tercapai, DPR akan kembali menjadi sasaran kritikan empuk, terutama dari kalangan pengamat dan warganet.

Martin juga meminta Pemerintah serius dalam menyelesaikan target pembentukan Undang-Undang yang sudah disepakati. Sebab, dalam membuat Undang-Undang, DPR tidak bisa kerja sendiri. Harus ada persetujuan dari Pemerintah.

"Jadi, sangat tergantung pada Pemerintah juga mau memprioritaskan apa. Intinya, harus ada keseriusan bersama antara DPR dan Pemerintah untuk bisa menuntaskan rencana kerja legislasi nasional tahun ini," pungkas dia. ■ KAL